



TERBANYAK UNTUK PENGUATAN MODAL Belanja Hibah Menyusut Rp 2,5 M

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berhasil merasionalisasi belanja hibah hingga akhir tahun ini. Dari alokasi semula sebesar Rp 56,7 miliar, akhirnya menyusut Rp 2,5 miliar menjadi Rp 54,2 miliar. Penyusutan dilakukan usai terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ.

Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menuturkan, hasil rasionalisasi belanja hibah tersebut sudah disepakati dalam perubahan APBD 2015. "Kami membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan identifikasi calon penerima hibah. Termasuk konsultasi dengan Pemda DIY dan akhirnya diputuskan demikian," terangnya, Senin (28/9).

Oleh karena itu, belanja hibah sempat ditunda pencairannya, kini sudah bisa dilanjutkan kembali. Sebelum terbit SE Menteri Dalam Negeri, sebanyak Rp10,3 miliar sudah berhasil dicairkan. Sisanya kini tinggal menunggu pengajuan dari instansi teknis pengguna anggaran.

Kadri menyampaikan, belanja hibah yang terpaksa ditunda atau dihapus lantaran tidak sesuai SE Menteri Da-

lam Negeri. Di antaranya karena belum berbadan hukum serta lembaga penerima yang berorientasi laba. Sebagian besar hibah yang tidak tersalurkan bertujuan untuk penguatan modal.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkotan) Kota Yogyakarta, Suyana mengatakan, banyak calon penerima yang sebelumnya diajukan ke instansinya akhirnya dihapus. Terutama berasal dari kelompok penguatan modal yang berjumlah 12 kelompok dengan total hibah berkisar antara Rp 40 juta hingga Rp 50 juta. "Sebenarnya hibah tersebut sangat dibutuhkan karena memang

perlu penguatan modal demi keberlangsungan usaha dalam kelompok atau organisasinya. Tapi kami juga tidak bisa menabrak aturan yang sudah ditetapkan," urainya.

Hampir semua kelompok tersebut berupa koperasi. Meski bukan termasuk organisasi nirlaba, namun kondisinya memang memprihatinkan.

Oleh karena itu, upaya lain akan dilakukan salah satunya dengan memasukkan dalam bentuk kegiatan dinas. Antara lain berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dibekali peralatan kerja. Sehingga tidak berbentuk belanja hibah secara langsung. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005